KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penolak Gedung Baru Harus Konkret
Tanggal : Jumat, 08 September 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Penolak Gedung Baru Harus Konkret

JAKARTA-Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI didesak agar mengambil tindakan konkret oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Hal itu terkait statemennya menolak wacana pembangunan gedung baru lembaga legislatif di Senayan yang menelan anggaran Rp 5,7 triliun. Mereka menyuarakan desakan tersebut saat audiensi dengan fraksi partai berlambang matahari, Kamis (7/9).

Menurut Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, bukan hanya soal penolakan pembangunan gedung baru akan tetapi diharapkan PAN mendukung pembatalan rencana kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tersebut. Alasannya, sambung Roy, pertama, pengajuan pembangunan gedung belum merepresentasikan keputusan bulat seluruh fraksi di DPR. Kendati fraksi seperti PAN, PPP, NasDem dan PKS telah menyatakan ketidaksetujuannya dan meminta rencana itu untuk ditangguhkan. "Harus ada tindakan konkret. Dengan adanya penolakan fraksi mestinya Ketua DPR menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan.

Kedua, sambung Roy, melanjutkan pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat. BURT DPR dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa dari pagu anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, terdapat usulan anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 miliar dan proyek pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar.

Ketiga, lanjutnya, jika rencana ini direalisasikan, maka APBN akan tersedot hingga Rp 1 triliun. Meskipun, BURT DPR menyampaikan rencana pembangunan gedung baru sebesar Rp 320 miliar. "Namun, perhitungan IBC dengan menggunakan ukuran yang diatur dalam Perpres 73/2011 dan Permen PU 45/2007 menunjukkan pembangunan gedung baru bakal menelan anggaran lebih dari Rp 950 miliar bahkan Rp 1 triliun," paparnya.

Sementara, kata Roy, terkait rencana kenaikan anggaran kunker, tidak menggambarkan urgensi dan kemanfaatannya terhadap prioritas DPR, tetapi hanya menghambur-hamburkan keuangan negara. Diketahui bersama, DPR mengajukan tambahan anggaran kunker yang fantastis menjadi Rp 413,98 miliar. "Seharusnya DPR elektif dalam merencanakan perjalanan dinas keluar negeri berdasarkan urgensi dan kemanfaatannya," tukas Roy.

Ditambahkan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Koalisi Masyarakat Sipil memilih berharap kepada Fraksi PAN karena memiliki kesamaan pendapat mengenai pembangunan gedung DPR. "Bahkan tidak kali ini saja, kalau ditelusuri sejak 2010 rencana pembangunan gedung itu mulai, PAN sudah dalam posisi menolak," kata Ray di lokasi yang sama.

Dia mengatakan, Koalisi Masyarakat Sipil berharap Fraksi PAN bisa mengajak fraksi lain untuk menghentikan rencana tersebut karena pembangunan gedung tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas etis dan moral DPR, termasuk soal kinerja.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto tidak mengungkapkan bila akan mengambil tindakan. Namun, Wakil Ketua Komisi II itu hanya menegaskan, bila partainya tetap konsisten menolak pembangunan gedung baru DPR dan menolak kenaikan dana parpol. "Saya menilai kenaikan dana parpol itu nggak adil, kenapa parpol harus disubsidi? Selama ini nggak disubsidi juga jalan kok. PAN gajinya dipotong 60 persen. Kalau bisa dibatalkan, saya berharap itu dibatalkan," ucapnya di Komplek parlemen, Senayan.

Dia justru mempertanyakan kenaikan dana parpol dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara di saat banyaknya subsidi rakyat yang dicabut. (aen)